



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSUF
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 515873

II. DATA HARTA

- | | | |
|--|------------|----------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 1.035.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 286 m ² /72 m ² di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000 | | |
| 2. Tanah Seluas 216 m ² di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000 | | |
| 3. Tanah Seluas 2500 m ² di KAB / KOTA PASER, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 300.000.000 | | |
| 4. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m ² /144 m ² di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 57.200.000 |
| 1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000 | | |
| 2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000 | | |
| 3. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000 | | |
| 4. MOTOR, HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 25.200.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 112.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 136.073.315 |



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.340.273.315
III. HUTANG	Rp.	122.537.282
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.217.736.033

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.